

Nama : M. Dimas Syaputra
NPM : 2213031012
Kelas : A
Mata Kuliah : Ekonomi Industri
Dosen Pengampu : Dr. Pujiati, S. Pd., M.Pd.
Drs. Nurdin, M.Si.
Meyta Pritandari., S.Pd., M.Pd.

STUDY CASE

1. Apa saja kelebihan dan kekurangan posisi Indonesia dalam GVC saat ini.

Jawaban : Kelebihan utama posisi Indonesia saat ini dalam GVC adalah keunggulan komparatif statis pada pasokan bahan baku yang melimpah dan beragam (nikel, batu bara, sawit, dll.), yang menjadikannya pemasok kunci di tingkat hulu (*upstream*) rantai nilai global. Kelebihan ini menjamin pendapatan ekspor yang stabil dan menarik investasi awal (FDI) pada sektor ekstraktif. Namun, kekurangan mendasarnya adalah kerentanan struktural dan nilai tambah yang minim. Sebagai eksportir bahan mentah, Indonesia terjebak di segmen GVCs dengan margin keuntungan terendah. Kerentanan ini terlihat dari ketergantungan pada permintaan global dan fluktuasi harga komoditas, sementara keuntungan tertinggi dari pengolahan dan teknologi (misalnya, pembuatan baterai dari nikel) dinikmati sepenuhnya oleh negara importir. Posisi ini juga membuat Indonesia gagal melakukan peningkatan nilai (*upgrading*) yang berkelanjutan.

2. Mengapa Indonesia belum berhasil mendapatkan nilai tambah yang optimal dalam GVC?

Jawaban : Indonesia belum berhasil mendapatkan nilai tambah yang optimal dalam GVC karena dua alasan utama yang saling terkait: Kapasitas Industri dan Ketergantungan Historis. Secara historis, Indonesia telah lama beroperasi berdasarkan keunggulan komparatif dalam bahan mentah, yang membentuk struktur industri domestik yang lemah dalam penguasaan teknologi pengolahan tingkat lanjut (R&D) dan SDM terampil. Selain itu, kurangnya koherensi kebijakan industrialisasi pasca-krisis 1998 (seperti yang dikritik dalam studi kebijakan industri) telah gagal menciptakan insentif yang kuat dan targeted untuk memaksa perusahaan multinasional melakukan transfer teknologi dan berinvestasi pada hilirisasi yang lebih dalam. Investor asing cenderung memilih negara yang memiliki

kepastian regulasi dan infrastruktur yang lebih efisien untuk mendirikan pabrik bernilai tambah tinggi.

3. Apakah kebijakan hilirisasi seperti larangan ekspor bijih nikel dapat meningkatkan posisi Indonesia dalam GVC? Jelaskan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan geopolitik.

Jawaban : Kebijakan hilirisasi melalui larangan ekspor bijih nikel secara ekonomi terbukti efektif dalam meningkatkan posisi Indonesia dalam GVC dari sekadar bijih mentah menjadi feronikel dan bahan baku baterai, yang secara signifikan mendongkrak nilai ekspor. Kebijakan ini berhasil menciptakan Industri 4.0 yang berorientasi SDA, memaksa investasi asing untuk masuk ke sektor pengolahan. Namun, dari aspek geopolitik, kebijakan ini membawa konsekuensi negatif. Larangan tersebut dipandang oleh negara mitra dagang seperti Uni Eropa sebagai pelanggaran aturan perdagangan bebas WTO karena dianggap sebagai pembatasan ekspor yang diskriminatif. Hal ini menciptakan friksi diplomatik dan gugatan hukum, mencerminkan adanya konflik kepentingan antara kedaulatan ekonomi domestik dengan norma-norma globalisasi.

4. Bagaimana dampak kebijakan ini terhadap hubungan Indonesia dengan negara mitra dagang?

Jawaban : Dampak kebijakan hilirisasi terhadap hubungan dagang Indonesia bersifat ambivalen. Di satu sisi, kebijakan ini memberikan posisi tawar (*bargaining power*) yang kuat kepada Indonesia, karena negara-negara maju dan produsen kendaraan listrik sangat bergantung pada pasokan nikel Indonesia. Hal ini memaksa mereka untuk berdialog dan berinvestasi langsung. Namun, di sisi lain, kebijakan ini menimbulkan ketegangan dan resistensi, terutama dari negara-negara yang memiliki kepentingan mengimpor bahan mentah dengan harga murah, yang menganggap Indonesia melanggar prinsip *free trade*. Kasus gugatan WTO oleh Uni Eropa adalah manifestasi nyata dari dampak negatif ini, menuntut Indonesia untuk menyeimbangkan antara kedaulatan industrialisasi dengan komitmen perjanjian dagang internasional

5. Jika Anda adalah penasihat ekonomi pemerintah, strategi apa yang akan Anda usulkan agar Indonesia mendapatkan nilai tambah lebih besar dalam GVC tanpa merusak hubungan dagang internasional?

Jawaban : Strategi yang akan diusulkan sebagai penasihat ekonomi pemerintah adalah: Transformasi *Conditional Upgrading* melalui Kemitraan Strategis Global. Rasional dari strategi ini adalah untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih besar tanpa secara langsung melanggar aturan dagang internasional, dengan mengalihkan fokus dari *larangan* menuju *insentif wajib kinerja*. Mengganti metode proteksionisme yang bersifat *prohibitive* (melarang ekspor mentah) menjadi Proteksionisme Cerdas yang bersifat *incentive-based* (mewajibkan investasi dan teknologi).